

Kebijakan luar negeri amerika terhadap indonesia 1998 - 2000 : friksi eksekutif dengan legislatif mengenai bantuan ekonomi melalui imf

Chodidah Budi Rahardjo, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=96895&lokasi=lokal>

Abstrak

esis ini membahas kebijakan luar negeri Amerika dibawah kepemimpinan Presiden Clinton terhadap Indonesia melalui peranannya di IMF tahun 1998-2000, pasca pemerintahan Soeharto. Mempertimbangkan kepentingan politik luar negeri Amerika di kawasan Asia Tenggara dan melihat kesempatan bagi Amerika untuk mcmpcroleh akses dalam mengontrol keputusan-keputusan politik yang penting di kawasan ini tennasuk Indonesia, maka kedudukan seorang presiden Amerika menjadi penting dan sangat menentukan di dalam cara-cara pengambilan keputusan. Walaupun Kebijakan luar negeri Amerika lebih banyak dijalankan oleh presidennya sendiri, namun ia tidak lepas dari kontrol Kongres, khususnya dari Senate Foreign Relations. Tanpa dukungan Senat, seorang presiden Amerika tidak dapat mcnjalankan kebijakan politik luar negerinya dengan baik

Hans J. Morgethau menyatakan bahwa isi dari kepentingan nasional Amerika ditentukan olch tradisi-tradisi poititik dalam konteks kebudayaan secara menyeluruh dimana Amerika rnerumuskan kebijakan Iuar negerinya. Kebijakan bantuan ekonomi Amerika kepada Indonesia periode 1998»2000, dibawah pemcrintahan Preeiden Clinton, dipola untuk melestarikan nilai-nilai Amerika pimerican values) yaitu memperluas dernokrasi dan sistem perdagangan bebas serta mcmpertahankan kepentingan keamanan Amerika di Asia Tcnggara khususnya Indonesia. Dalam melaksanalcan kebijakan Iuar negeri tersebut, Presiden Clinton cenderung unnrk memanfaatkan institusi moneter internasional yaitu IMF. Pemanfaatan bantuan Iuar ncgeri melalui IMF selain memperkuat komitmen Amerika pada jalur diplomasi idealis yang telah dirintis oleh Presiden Wilson juga menghindari terjadinya friksi yang rnungkin timbul antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam pembangunan ekonominya. Dalam arti lain, dengan rncnerapkan muscular multilateralism, Presiden Clinton melandaskan politik Iuar ncgeri yang menj aga jarak atau equidistant policy.

Policy of equidistance ini rncnirnbulkan Iiiksi dengan lembaga legislatif dan pendapat umurn. Baik legislatif maupun pendapat umurn melihat diplomasi muscular mulrilateralism ter-sebut justnr lebih memberatkan dan membebani ralcyat Indonesia dari pada membantunya. Lebih dari itu adalah bahwa muscular multilateralism akan meminimalkan peran negara Amerika Serikat sebagai aktor utama yang bermain di Indonesia. Dengan dernikian prestige dan pengaruh Amerika tidak menonjol. Akibatnya Amerika bukan lagi berperan sebagai super power yang harus memimpin kerja sama regional di Asia Tcnggara.

Penerapan policy ini tentu banyak menguntungkan bagi Amerika Scrikat baik

secara economic cost maupun political cost. Oleh karena itulah Pemerintah Presiden Clinton secara sungguh-sungguh memprojuangkan agar Kongres memahami, mendukung, dan akhirnya menyetujui terlaksananya policy tersebut. Clinton berkeyakinan bahwa policy yang diterapkan akan banyak membenarkan keuntungan bagi kepentingan Amerika. Bisa dikatakan bahwa dengan meminjam tangan IMF, Amerika hanya mengeluarkan sedikit pengorbanan dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya."

Penulisan tesis ini menggunakan metoda deskriptif-kualitatif dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis (data sekunder), baik yang diperoleh dari berbagai macam literatur yang relevan dan memanfaatkan hasil-hasil dari suatu penelitian yang dituangkan dalam jurnal-jurnal ilmiah atau sumber-sumber lainnya.

Bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia secara sungguh-sungguh dan menyeluruh adalah merupakan kepentingan Amerika sebagai manifestasi dari "doctrine of enlargement" nya. Terwujudnya demokrasi di Indonesia akan berperan sebagai frontier politik Amerika sehingga peran "super power" Amerika seperti pada masa Perang Dingin tidak diperlukan lagi. Disamping itu, terwujudnya demokrasi akan memperluas ekonomi negeri ini yang berorientasi pada pasar (market-oriented economics). Kondisi tersebut memungkinkan terwujudnya kepentingan ekonomi Amerika yang selanjutnya mampu menghasilkan usaha-usaha yang bisa mendukung pada kemitraan yang global.